

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI ALUN-ALUN AIMAS
KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)



Disusun Oleh

Nama : Nurul Khotimah

NIM : 146520120039

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI ALUN -ALUN AIMAS
KABUPATEN SORONG

NAMA : Nurul Khotimah
NIM : 146520120039

Telah disetujui tim pembimbing
Pada 13 Juni 2024

Pembimbing I

Karmila Sinen, S.IP., M.I.P.
NIDN. 1421068801


.....

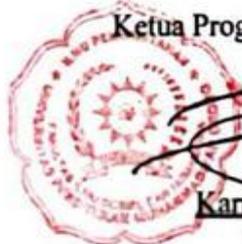
Pembimbing II

Jusmin, M.Ec.Dev.
NIDN. 1401088801


.....

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Karmila Sinen, S.IP.M.I.P.
NIDN. 1421068801

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI ALUN -ALUN AIMAS
KABUPATEN SORONG**

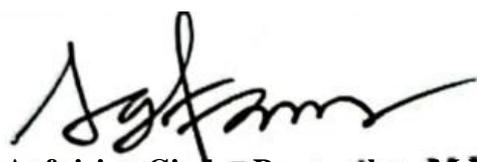
NAMA : Nurul Khotimah

NIM : 146520120039

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada : 2024

Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik

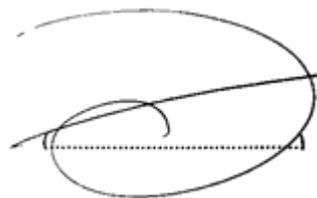


Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN. 1420089201

Tim Penguji Skripsi

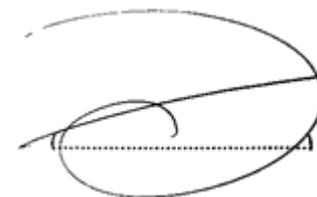
1. Karmila Sinen, S.IP., M.I.P.

NIDN. 1421068801



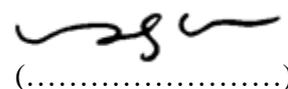
2. Karmila Sinen, S.IP., M.I.P.

NIDN. 1421068801



3. Yoga Andriyan, S.IP., M.I.P.

NIDN. 1421059501



(.....)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong, 21 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Nurul Khotimah

NIM. 146520120039

ABSTRAK

Nurul Khotimah/ 146520120039. **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI ALUN-ALUN AIMAS KABUPATEN SORONG** Skripsi. Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Mei 2024

Permasalahan sampah di Kabupaten Sorong hingga saat ini belum bisa diselesaikan dengan baik. Kabupaten Sorong memiliki peningkatan sampah yang meningkat tiap tahunnya tidak hanya pemerintah Kabupaten Sorong yang lamban dalam menangani sampah, masyarakat pun kurang sadar akan kebersihan. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sorong dan faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sorong.

Penelitian ini berusaha menjelaskan dan menganalisis proses implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di kabupaten sorong. Penelitian ini dirasa penting karena untuk menjelaskan pentingnya model implementasi kebijakan dalam suatu proses kebijakan publik. Sebab sebagus apapun konsep dan suatu perencanaan kebijakan, tanpa disertai implementasi kebijakan yang baik, maka akan menimbulkan kebijakan yang gagal. Teori yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan model Edward III 1980.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi. Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten sorong kurang berjalan dengan baik hal ini dikarenakan masih menemukan kendala yaitu kurangnya sarana prasarana yang disediakan Oleh pemerintah dalam pengangkutan sampah, kurangnya tempat pembuangan sampah sementara serta kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait menjaga lingkungan sekitar dan belum diterapkannya sanksi tegas terkait pelanggaran aturan di kabupaten sorong dalam melakukan pembuangan sampah secara sembarangan.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan

ABSTRACT

Nurul Khotimah/146520120039. IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL SERVICES (DLH) POLICY IN WASTE MANAGEMENT IN AIMAS SQUARE, SORONG DISTRICT Thesis. Faculty of Law, Social and Political Sciences. Sorong Muhammadiyah University of Education. May 2024

Until now, the waste problem in Sorong Regency has not been resolved properly. Sorong Regency has an increase in waste which increases every year. Not only is the Sorong Regency government slow in handling waste, the public is also less aware of cleanliness. The aim of this research is to determine the implementation of waste management policies in Sorong Regency and the supporting and inhibiting factors for the implementation of waste management policies in Sorong Regency.

This research seeks to explain and analyze the policy implementation process in waste management in Sorong district. This research is considered important because it explains the importance of policy implementation models in a public policy process. Because no matter how good the concept and policy planning is, without good policy implementation, it will result in failed policies. The theory used as analysis in this research is the Edward III 1980 model of policy implementation theory.

The method in this research uses a qualitative method. Data collection techniques using interviews, documentation and observation. Based on this research, it can be concluded that the results of the research show that the implementation of the Waste Management Policy in Sorong Regency is not going well, this is because there are still obstacles, namely the lack of infrastructure provided. By the government in transporting waste, there is a lack of temporary waste disposal sites as well as a lack of awareness from the community regarding protecting the surrounding environment and the implementation of strict sanctions regarding violations of regulations in Sorong district regarding careless waste disposal.

Keywords: Policy Implementation

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah saya panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI ALUN-ALUN AIMAS KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA” tepat pada waktu yang telah ditentukan. Tujuan penulisan Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (S1) Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang membantu dan memberikan motivasi, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Rustamadji, M.Si. selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong
2. Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I. sebagai Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik
3. Karmila Sinen, S.IP., M.I.P. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Pembimbing I yang sama-sama bertanggung jawab atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan yang cermat, koreksi yang membantu, saran serta dorongan yang mendukung selama konsultasi.
4. Jusmin, M.Ec.Dev. sebagai Pembimbing II yang sudah memberikan arahan, saran dan perbaikan sehingga proposal ini menjadi jauh lebih baik.

5. Semua dosen Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik atas ilmu yang berharga, serta nasehat-nasehat yang mendukung.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk keluarga yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi yang besar selama masa perkuliahan.
7. Kepada pemilik nama Andika Dirgantara, S.Kom terima kasih atas dukungan, motivasi, do'a serta cinta yang telah diberikan kepada penulis, serta terima kasih telah setia meluangkan waktunya, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. terima kasih telah menjadi bagian dari kehidupan saya, harapan saya semoga kita bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang kita impikan.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik materi yang tercakup didalamnya maupun tata cara penyajiannya. Dengan kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan. semoga skripsi ini dapat menjadi masukan yang berharga bagi kita semua dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan bersama.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sorong, 20 Mei 2024

Penulis,

Nurul Khotimah

NIM : 146520120039

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Definisi Implementasi.....	9
2.1.1 Implementasi Kebijakan Publik	11
2.1.2 Tahapan Operasional Implementasi	16
2.1.3 Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan.....	16
2.2 Dinas Lingkungan Hidup (DLH).....	17
2.3 Pengertian Sampah	19
2.3.1 Pengelolaan Sampah	20
2.4 Alun-alun Aimas	20
2.5 Penelitian Terdahulu.....	21
2.6 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel	36

2.7 Kerangka Berpikir	40
BAB III.....	42
METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Fokus Penelitian	42
3.3 Lokasi dan waktu Penelitian.....	43
3.3.1 Lokasi Penelitian	43
3.3.2 Waktu Penelitian	44
3.3.3 Interview Wawancara.....	44
3.4 Jenis Data dan Sumber Data.....	45
3.4.1 Data Primer	45
3.4.2 Data Sekunder	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data	46
3.5.1 Observasi	46
3.5.2 Wawancara	47
3.5.3 Dokumentasi.....	47
3.6 Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV PEMBAHASAN.....	51
4.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sorong.....	51
4.2 Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan	59
4.3 Dinas Lingkungan Hidup.....	62
4.4 Tanggapan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah di Alun-alun Aimas.....	64
5.1 Faktor Pendukung dan Penghambat Impelemntasi Kebijakan	66
5.5.1 Faktor Pendukung.....	66
5.5.2 Faktor Penghambat.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	70

Lampiran Informan Penelitian.....	71
Lampiran Surat Keterangan Penelitian.....	74
Foto Bersama Responden Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong..	75
Foto Bersama Responden Kepala Bidang dan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.....	76
Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Sorong.....	77
Foto tumpukan sampah di Alun-alun Aimas Kabupaten Sorong.....	77

DAFTAR GAMBAR

gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir.....	41
gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4.1 Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong.....	54
Tabel 4.2 Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah adalah masalah klasik yang ada di Indonesia. Mulai dari sampah plastik, daun-daun dan sampah lainnya. Dari zerowaste.id mengemukakan bahwa Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan bahwa tahun 2022 sampah di Indonesia akan mencapai 68 Juta tons. Sedangkan plastik diperkirakan akan mencapai 9.52 tons. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa sampah di Indonesia akan meningkat setiap tahunnya yang kenaikannya diperkirakan satu juta per tahunnya. World Economic Forum (WEF) memprediksi bahwa tahun 2050 yang akan datang sampah plastik yang ada akan melebihi jumlah ikan. WEF memprediksikan jumlah produksi sampah plastik akan meningkat tiga kali lipat secara global menjadi 1.124 miliar ton.

Pemerintah Daerah juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola sampah tersebut seperti membuat aturan larangan membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Menurut Ehworm (2008) tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yakni mengatur tentang sampah rumah tangga, didaur ulang, atau dibuang dengan benar. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan menginformasikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada pihak yang dapat membantu mengelola sampah. Peran pemerintah dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan dari seluruh skala (skala kota dan lingkungan). Dari SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah

Perkotaan, pelayanan pemerintah untuk pengelolaan sampah terkait penanganan sampah yakni pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pengangkutan. Pada keempat tahap tersebut, pemerintah bertugas untuk memberikan pelayanan dan fasilitas sampai sampah tersebut ke TPA dan atau diolah sebagaimana mestinya.

Pertambahan jumlah sampah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang ramah lingkungan maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Secara ekonomis masalah sampah juga berkaitan dengan persoalan retribusi sampah. Masalah yang sering dijumpai adalah retribusi yang terkumpul sangat terbatas dan tidak sebanding dengan biaya operasionalnya. Ini dikarenakan masyarakat yang masih kurang sadar untuk membayar retribusi sampah. dengan hal ini masyarakat diwajibkan untuk membayar retribusi sampah tetapi masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran retribusi sampah menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk membuang sampah tidak pada tempatnya. retribusi sampah diartikan sebagai pembayaran atas jasa khusus disediakan dana tau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau suatu badan. Sehingga retribusi sampah berarti biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada jasa pelayanan sampah dan pengelolaan sampah.

Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan pada Bab 1 pasal 1 ayat 1, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menjaga lingkungan hidup adalah salah satu tugas kita sebagai manusia. Hal ini akan membantu melestarikan keanekaragaman hayati, mencegah kerusakan

ekosistem, dan menghindari punahnya spesies yang akan mengganggu rantai makanan.

Peraturan tentang lingkungan hidup ini dibuat demi kebaikan bersama, termasuk untuk kehidupan manusia itu sendiri. Karena jika pelaku industri hanya fokus pada keuntungan dan mengabaikan lingkungan di sekitarnya, maka lingkungan hidup di sekitar akan kehilangan kemampuan untuk berperan mendukung aktivitas manusia. Akibatnya, bencana seperti banjir, erosi, polusi, pencemaran, dan sebagainya akan terjadi pada lingkungan yang diabaikan.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah.

Permasalahan tumpukan sampah di Alun-alun Aimas menimbulkan persoalan klasik, yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Tumpukan sampah di Alun-alun Aimas selain mengganggu pemandangan dan lingkungan juga mengganggu kenyamanan bagi pengunjung wisata Alun-alun Aimas. masyarakat yang berkunjung lalai menjaga kebersihan serta kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya, sehingga sekitaran Alun-alun Aimas tampak dipenuhi sampah plastik dan botol air mineral yang berserakan. Sehingga menimbulkan lingkungan yang kurang asri. tidak ada kesadaran dari masyarakat akan pentingnya lingkungan, serta membuang ludah pinang yang bisa merusak

keindahan Alun-alun Aimas. Masalah tersebut terjadi karena kurangnya ketegasan dan sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang berkunjung. Serta kurangnya kesadaran petugas kebersihan untuk mengontrol tempat sampah yang tersedia. Alun-alun Aimas yang menjadi *icon* Kabupaten Sorong seharusnya tertata dan terawat dengan rapi dan bersih dari sampah. Alun-alun aimas dapat menumbuhkan perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Sorong.

Alun-alun Aimas merupakan tempat yang strategis dimana banyak sekali para pedagang kaki lima berkumpul untuk berjualan berbagai macam makanan dan minuman serta permainan untuk anak-anak dan dewasa sehingga banyak sekali masyarakat yang berkunjung di alun-alun. Dengan adanya Alun-alun Aimas membuat meningkatnya perekonomian bagi masyarakat yang berjualan. menurut Narasumber yang bernama Ibu Fitri pendapatan perhari tidak menentu tergantung dengan kondisi cuaca, jika kondisi cuaca cerah maka pendapatan perhari bisa mencapai Rp.200.000 hingga Rp.700.000 jika di kalkulasi pendapatan sebulan bisa mencapai Rp.6.000.000 hingga Rp.21.000.000, dengan hasil penjualan para pedagang kaki lima membayar pajak kepada pemerintah dalam sebulan sebesar Rp.250.000

Alun-alun Aimas juga memiliki tukang parkir, untuk tarif parkir kendaraan roda dua senilai Rp2.000 dan kendaraan roda empat senilai Rp.5.000 jika di kalkulasi maka penghasilan perhari Rp.100.000 hingga Rp.200.000 tergantung dengan kondisi cuaca. Hasil pendapatan dari karcis kendaraan roda dua dan roda empat di stor sebagai pajak pemerintah perharinya sebesar Rp.30.000

Pemerintah Kabupaten Sorong menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Bahwa dalam mewujudkan lingkungan

yang bersih dan sehat diperlukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat secara profesional, efektif, dan efisien. Walaupun telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sorong dalam kenyataannya tidak sejalan dengan apa yang diharapkan karena masih banyak masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Sehingga menyebabkan sampah menumpuk dan tidak adanya perhatian dari Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi leading sector. Leading sector adalah pergerakan yang dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Leading sector ini tergambar dari kontribusi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih maju. Dengan adanya leading sector diharapkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dapat memberikan arahan serta kontribusi kepada masyarakat agar bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitar alun-alun aimas untuk membuang sampah sesuai pada tempatnya, sehingga parawisata merasa nyaman ketika berkunjung di Alun-alun aimas.

Alun-alun Aimas merupakan buah karya dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Alun-alun Aimas memiliki beragam fasilitas olahraga mulai dari lapangan bola voli, lapangan bola basket, dan lintasan lari yang bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar, serta tersedianya fasilitas wahana bermain anak-anak yang dapat digunakan untuk wadah pendidikan bagi anak usia dini. Alun-alun Aimas juga menjadi tempat berkumpulnya para pedagang kaki lima mulai dari mama asli papua serta masyarakat pendatang yang menjadikan Alun-alun Aimas sebagai mata pencaharian dengan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI ALUN-ALUN AIMAS KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana implementasi kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam Pengelolaan sampah di Alun-alun Aimas kabupaten sorong?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah di Alun-alun aimas kabupaten sorong?

1.4 Manfaat Penelitian

Dari judul penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat yang berarti baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang ingin di berikan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan perkembangan pengetahuan yang berhubungan dengan pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan untuk bahan pemahaman sebagai penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau menjadi bahan masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.
- b. Bagi Masyarakat, penelitian ini mampu meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.

- c. Bagi penyusun, untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman penyusun terutama dalam meningkatkan lingkungan yang bersih.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Implementasi

Implementasi atau pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Menurut Fullan (2020), implementasi adalah suatu proses dalam mempraktekkan sebuah ide, gagasan atau seperangkat aktivitas bagi orang lain untuk mencapai sebuah perubahan. Sedangkan menurut Ripley dan Franklin (1982) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah penetapan undang-undang yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, ataupun sejenis keluaran yang nyata. Problem implementasi diasumsikan sebagai sebuah deretan keputusan dan interaksi sehari-hari yang tidak terlalu perlu mendapat perhatian dari para sarjana yang mempelajari politik. Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai penerapan atau tahap pelaksanaan dari sebuah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi, sebelum diimplementasikannya sebuah kebijakan terlebih dahulu harus dirancang di formulasi kebijakan. Maka dari itu, implementasi lebih bersifat praktis sedangkan formulasi lebih bersifat teoritis. Implementasi kebijakan lebih mengarah kepada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Studi implementasi adalah studi perubahan: bagaimana perubahan dapat terjadi dan bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Studi ini juga merupakan studi tentang mikrostruktur dari kehidupan politik; bagaimana

sebuah organisasi baik di luar maupun di dalam menjalankan urusan mereka dan saling berinteraksi; apa motivasi mereka untuk melakukan hal tersebut, dan apa yang membuat mereka untuk melakukan hal yang berbeda. (Jenkins, 1978).

Implementasi mengacu kepada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam sebuah keputusan. Tindakan yang dilakukan dengan cara mengubah mengubah sebuah keputusan menjadi pola operasional dan mencapai perubahan baik kecil maupun besar seperti apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan terhadap keputusan sebelumnya. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan yakni:

- a. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- b. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- c. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- d. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- e. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- f. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya harus terdapat hal-hal berikut:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

2.1.1 Implementasi Kebijakan Publik

Saat ini pemerintah sedang menjadi sorotan publik sehubungan dengan kebijakan publik. Tanpa adanya implementasi yang efektif keputusan yang dibuat oleh pembuat kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan sukses. Studi mengenai implementasi kebijakan sangat penting bagi studi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari pembuatan kebijakan antara membangun kebijakan seperti disetujuinya undang-undang oleh legislatif, dikeluarkannya perintah eksekutif, penyerahan keputusan pengadilan, atau pengumuman mengenai peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang-orang yang terpengaruh akan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu proses kebijakan publik dan merupakan bagian paling penting, sebaik apapun proses kebijakan tersebut disusun, diagendakan dan diformulasikan akan kurang berarti tanpa proses implementasi. Implementasi kebijakan publik adalah bagian paling krusial, bersifat krusial karena bagaimanapun baiknya suatu ke dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak bisa diwujudkan (Widodo:2019:17).

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:102) menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh kebijakan. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami.

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahan yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input. Implementasi Kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Pendekatan Edward III 1980 dalam mempelajari implementasi kebijakan dimulai dengan gambaran dan pertanyaan, yakni Apa sajakah persyaratan bagi suksesnya implementasi kebijakan? Apa halangan utama untuk suksesnya implementasi kebijakan. Untuk menjawab pertanyaan ini terdapat empat faktor penting atau variabel dalam implementasi kebijakan publik, yaitu: komunikasi, sumberdaya, watak atau perilaku, dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Agar implementasi bisa berjalan efektif, mereka yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Perintah untuk implementasi kebijakan harus disebarkan pada personel yang tepat, dan perintah tersebut harus jelas, akurat dan konsisten. Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Secara umum Edward III 1980 membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan. Transmisi, menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja

namun juga disampaikan pada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. Sebab seringkali ditemui banyak hambatan dalam proses implementasi seperti pertentangan pendapat antara pelaksana kebijakan dengan pengambil kebijakan.

b. Sumber daya

Tanpa adanya sumberdaya, personal yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan akan bekerja tidak efektif, meskipun perintah telah diberikan secara jelas dan konsisten, serta disebarkan secara tepat. Sumberdaya yang penting antara lain staf yang cukup jumlah dan kemampuannya, informasi yang sesuai mengenai bagaimana perintah dilaksanakan, kewenangan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan seperti yang diharapkan, dan fasilitas yang dapat memberikan pelayanan seperti gedung, peralatan, lahan dan persediaan. Berikut penjelasan mengenai detail dari variabel sumberdaya:

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III 1980, sumber daya manusia (Staf) harus cukup dan cakap. Artinya bahwa SDM harus memadai secara jumlah atau cukup serta terampil dan ahli atau cakap. Ditekankan bukan banyaknya jumlah SDM tetapi harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tanggung jawabnya agar tercipta efektivitas.

d. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya lain yang juga cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan yaitu sumber daya anggaran. Terbatasnya anggaran akan menghambat pelaksanaan program, terbatasnya anggaran yang tersedia juga akan memengaruhi kualitas pelayan yang diberikan kepada masyarakat.

e. Disposisi

Jika kebijakan ingin dilaksanakan dengan efektif, pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka juga harus memiliki hasrat untuk melaksanakannya. Disposisi meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai. Edward III 1980 dalam Widodo (2019:103) menyatakan bahwa Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan harus dilakukan dan mampu melakukannya namun juga ditentukan oleh kemauan pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Disposisi akan muncul diantara para pelaku kebijakan manakala akan menguntungkan bagi organisasinya dan dirinya pribadi. Proses disposisi ini memerlukan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian akan timbul sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap kebijakan. Kebijakan yang ditolak oleh pelaksana kebijakan misal organisasi pelaksana kebijakan merasa tidak diuntungkan dengan adanya kebijakan yang ada maka disinilah disposisi menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan.

f. Struktur Birokrasi

Jika sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan telah cukup dan pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukannya dan ingin melakukannya, implementasi masih dapat dirintangi karena kekurangan struktur birokrasi. Pembagian organisasi dapat menghalangi koordinasi yang penting bagi suksesnya pelaksanaan kebijakan yang kompleks dan membutuhkan kerjasama dari banyak pihak, dan pembagian ini juga dapat membuang sumberdaya yang terbatas, menghambat perubahan, menciptakan kebingungan, membawa kepada pekerjaan yang menyimpang dari tujuan, dan menghasilkan terlupanya fungsi penting. Pelaksana

kebijakan mungkin mengetahui apa yang harus dilakukan dan oleh sejauh mana pelaku kebijakan mengetahui apa yang memiliki sumber daya yang memadai, namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut masih menghalangi proses implementasi karena struktur organisasi yang dimiliki. Dua ciri utama dari birokrasi adalah Standard Operating Procedures (SOP) dan pembagian tugas.

2.1.2 Tahapan Oprasional Implementasi

Tahapan-tahapan operasional implementasi sebuah kebijakan (Dedy Mulyadi, 2019):

a. Tahapan Interpretasi

Tahapan interpretasi, merupakan tahapan yang masih bersifat abstrak dan sangat umum yang kemudian dijabarkan yang bersifat manajerial dan operasional. tetapi pada tahapan ini, tidak hanya berupa proses penjabaran dari kebijakan abstrak ke petunjuk pelaksanaan teknis, namun juga berupa proses komunikasi dan sosialisasi kebijakan tersebut, baik berbentuk abstrak ataupun operasional. Kebijakan abstrak tertuang dalam bentuk peraturan perundangan yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif yang biasanya dalam bentuk Perda dan Undang-Undang. Kebijakan manajerial tertuang dalam bentuk keputusan eksekutif seperti Peraturan Presiden maupun Keputusan Kepala Daerah, sedangkan kebijakan operasional tertuang dalam keputusan pejabat pemerintahan yang berupa keputusan menteri atau keputusan kepala dinas tertentu.

b. Tahapan Pengorganisasian

Tahapan pertama yang dilakukan adalah penentuan pelaksana kebijakan yakni instansi pemerintah baik pusat ataupun daerah, swasta ataupun LSM dan

masyarakat. Setelah adanya pelaksanaan kebijakan, selanjutnya menentukan prosedur yang biasanya tetap berupa prosedur operasi standar (SOP) atau standar pelayanan minimal (SPM) pelaksana yang akan digunakan sebagai pedoman dan petunjuk bagi pelaksana kebijakan agar tidak salah arah dan tujuan. Kemudian setelah penentuan prosedur, selanjutnya adalah penentuan pembiayaan yakni besarnya anggaran dan sumbernya darimana. Biasanya sumber pembiayaan ini bisa berasal dari sektor pemerintah, swasta ataupun masyarakat. Selain itu juga diperlukan fasilitas guna menunjang pelaksanaan kebijakan. Kemudian ditetapkan bagaimana manajemen pelaksana kebijakan dan jadwal implementasi kebijakan guna menjadi tolak ukur efisiensi implementasi kebijakan. Tahapan Implikasi Tahapan implikasi merupakan tahapan perwujudan dan pelaksanaan dari tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

2.1.3 Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik, banyak ahli yang berpendapat tentang faktor-faktor yang memengaruhi hal tersebut. Dari kumpulan faktor yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan (Deddy Mulyadi, 2019):

a. Isu atau *content* Kebijakan

Faktor pertama yang diulas adalah bagaimana isu dari kebijakan tersebut, beliau memaparkan setidaknya isu kebijakan yang baik memiliki sifat berikut yakni: isunya harus jelas, tidak distortif, dan sudah ada teori yang mendukung isu tersebut sehingga dapat dipercaya. Kemudian isu dari kebijakan itu mudah dikomunikasikan ke kelompok yang kemudian akan merasakan kebijakan tersebut serta didukung oleh sumber daya dan finansial yang memadai.

a. Implementor dan Kelompok Target

Terlaksananya sebuah kebijakan tidak terlepas dari peran seorang implementor dan target dari kebijakan tersebut. Implementor yang baik seharusnya memiliki sifat kapabilitas, kompetensi, komitmen, dan konsistensi agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif. Tidak hanya seorang implementor, tetapi target kebijakan juga memengaruhi sebuah kebijakan. Target kebijakan yang lebih *open minded*, terdidik dan homogen memiliki peluang besar tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut dibanding dengan target kebijakan yang tertutup, tradisional dan heterogen.

c. Lingkungan

Faktor keberhasilan implementasi kebijakan selanjutnya adalah lingkungan, dimana lingkungan yang dimaksud seperti kondisi sosial ekonomi, politik dan budaya yang berlaku di masyarakat tersebut. Semakin terbuka dan stabil lingkungan masyarakat maka akan semakin mempermudah implementasi sebuah kebijakan, seperti kondisi sosial ekonomi yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis serta budaya yang terbuka serta masyarakat yang *open minded*.

2.2 Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

DLH merupakan Lembaga Teknis Daerah yang merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 35 ayat (2) dinas Daerah kabupaten/kota di pimpin oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

DLH merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. dasar hukum keberadaan DLH Kabupaten Sorong adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong.

Pasal 2 PP No 38 th 2007 menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan atau susunan pemerintahan, dan salah satu contohnya adalah bidang lingkungan hidup. Lebih lanjut, Pasal 3 Peraturan daerah No 4 Tahun 2017 menyatakan bahwa DLH menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

a. Visi Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Setiap lembaga pemerintahan pasti mempunyai visi dan misi sebagai pedoman yang hendak dituju. DLH Kabupaten Sorong mempunyai visi Kabupaten sorong maju bersama, rakyat cerdas, sehat, dan sejahtera.

b. Misi Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

mewujudkan visi, ditetapkanlah misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong, membangun infrastruktur infrastruktur ekonomi pedesaan dan perkotaan.

2.3 Pengertian Sampah

Untuk mengetahui dan mengenal tentang pengertian sampah maka berikut ini dikemukakan berbagai definisi dan batasan mengenai sampah yang banyak tertulis dalam buku yang bersumber dari beberapa organisasi dan ahli persampahan serta lingkungan, antara lain (Trisna, 2014:4) :

- a. Menurut *WHO expert commite*, *Jhon Pickford- Solid wastes are useless, unwanted or discarded material arises from man's activities and not free-following.*
- b. Berdasarkan SK SNI 19-2454, sampah adalah limbah padat yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang sudah di anggap tidak berguna lagi dan terus di kelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.
- c. Menurut Anwar, sampah adalah segala sesuatu yang tidak berguna, tidak bernilai dan tidak di inginkan lagi pada saat dimana pemiliknya membuangnya yang dapat berasal dari hasil aktivitas baik manusia maupun mahluk hidup lainnya namun dapat bernilai pada saat pihak kedua memanfaatkannya.
- d. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, maka secara sederhana sampah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari kegiatan atau aktivitas manusia atau mahluk hidup lainnya yang berbentuk padat yang tidak di inginkan.

2.3.1 Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan Pembatasan timbulan sampah, Pendaaur ulangan sampah, dan Pemanfaatan kembali sampah. Sedang kegiatan penanganan sampah meliputi :

Pemilahan, dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah. Pengumpulan, dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara / tempat pengolahan sampah terpadu. Pengangkutan, yaitu membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah. sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah, dan pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengolahan yang sebelumnya menuju ke media lingkungan secara aman. Untuk pengelolaan sampah spesifik menjadi tanggung jawab pemerintah. Saat ini, pengelolaan sampah yang sering digunakan dalam masyarakat adalah 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang berarti pengurangan, penggunaan kembali, dan pendaurulangan.

2.4 Alun-alun Aimas

Alun-alun Aimas mulai dibangun pada tahun 2017, yang merupakan buah karya dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendesain bangunan tersebut dirinya memberikan sentuhan semangat budaya melalui ragam hiasnya. Bagian tersebut dihadirkan pada polanya, ragam hias sebagai pembatas yang terinspirasi

dari pohon besar di sorong. Ide ini kemudian diperlihatkan pada struktur bangunan bagian depan dari Alun-alun aimas. Pada desain ini menjadi pembeda antara alun-alun aimas dengan alun-alun di daerah lain. dan satu-satunya ada di kabupaten sorong. dalam alun-alun aimas tersedia beberapa fasilitas olahraga seperti lapangan voli, lapangan basket, lintasan lari, serta beberapa fasilitas permainan anak serta pedagang kaki lima dan mama-mama papua yang berjualan di sekitar alun-alun aimas.

Alun-alun aimas merupakan *icon* kabupaten sorong, sehingga dalam tempat tersebut harus mewadahi semua fungsi serta menjadi ruang demokrasi. Tidak hanya itu Alun-alun aimas juga dapat dipergunakan untuk acara-acara besar seperti upacara, acara keagamaan, acara pernikahan, serta acara-acara besar lainnya.

Dengan adanya Alun-alun aimas yang menjadi *icon* kabupaten sorong serta alun-alun aimas menjadi peluang besar yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. besar harapan sebagai masyarakat di himbau agar dapat bersama-sama merawat dan menjaga alun-alun aimas ini agar tetap bersih, asri serta menjadi kebanggaan bagi masyarakat kota maupun masyarakat kabupaten sorong.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Kelebihan dan Kekurangan Jurnal
1.	Arif Komarudin, Arifah Rosmajudi, Acep Hilman	Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di	2023	Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis di Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan	Kelebihan jurnal tersebut mencakup adanya pendekatan studi kasus yang memberikan wawasan mendalam terkait implementasi kebijakan

		Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya		<p>adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, minimnya kesadaran masyarakat tentang pemilahan sampah, dan kendala koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat. Faktor-faktor seperti komunikasi yang kurang, keterbatasan sumber daya, disposisi pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi juga mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut.</p>	<p>pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Metode kualitatif yang digunakan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang dihadapi dan mencakup hasil penelitian yang menggambarkan tantangan utama, seperti kurangnya infrastruktur dan kesadaran masyarakat. Penelitian ini juga membahas faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi implementasi kebijakan.</p> <p>Namun, jurnal tersebut juga memiliki kekurangan. Sebagai contoh, kebijakan yang dibahas mungkin telah berubah sejak penelitian dilakukan, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini. Selain itu, aspek generalisasi dari hasil penelitian mungkin terbatas karena fokus pada satu kecamatan dan</p>
--	--	---	--	---	---

					<p> mungkin tidak dapat diaplikasikan secara langsung ke konteks lain. Selain itu, penelitian kualitatif cenderung subjektif, dan aspek ini dapat mempengaruhi interpretasi data. Evaluasi lebih lanjut tentang metodologi penelitian dan pengakuan terhadap keterbatasan tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait validitas dan relevansi hasil penelitian.</p>
2.	Moh. Daud Marasabessy, Idris Rumodar	Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Dampak Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Ambon (Studi Kasus Pasar Mardika)	2022	Hasil penelitian dari jurnal "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Dampak Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Ambon (Studi Kasus Pasar Mardika)" oleh Moh. Daud Marasabessy dan Idris Rumodar menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pasar Mardika, Kota Ambon, terbilang baik dari segi efektivitas, dengan sumber daya manusia dan finansial yang telah diorganisir, serta upaya komunikasi melalui sosialisasi dan media.	Jurnal "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Dampak Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Ambon (Studi Kasus Pasar Mardika)" memiliki kelebihan dalam pendekatan penelitian studi kasus yang memberikan wawasan mendalam terhadap implementasi kebijakan di Pasar Mardika. Analisis dampak kehidupan sosial masyarakat memberikan kontribusi signifikan dengan menggali aspek-aspek

				<p>Meskipun demikian, terdapat kendala pada sumber daya seperti sarana penunjang yang dinilai kurang memadai, terutama kendaraan pengangkut sampah. Efisiensi waktu penyelesaian juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan sarana penunjang guna mengoptimalkan pengelolaan sampah di pasar tersebut.</p>	<p>non-teknis dari kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, jurnal ini menekankan evaluasi efektivitas implementasi melalui pemantauan sumber daya manusia, finansial, dan upaya komunikasi. Namun, sebagai kelemahan, terdapat potensi keterbatasan dalam menggeneralisasi temuan studi kasus ke konteks yang lebih luas, dan fokus pada aspek kehidupan sosial mungkin mengorbankan analisis teknis tertentu dari pengelolaan sampah. Meskipun demikian, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memandu evaluasi kebijakan dan arah penelitian di masa mendatang.</p>
3.	Lia Puspa Sari, Ju'im Thaap, Titi Darmi	Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup	2021	<p>Hasil penelitian dari jurnal ini menyajikan analisis kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer dan sekunder. Implementasi kebijakan peraturan daerah Nomor 02</p>	<p>Jurnal ini memiliki beberapa kelebihan, seperti penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran mendalam tentang pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, serta pemanfaatan sumber</p>

				<p>tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dinilai telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan, tetapi masih ditemukan kendala seperti kekurangan sarana dan prasarana yang berdampak pada proses pengangkutan sampah. Meskipun kebijakan telah mencapai target grup, analisis menunjukkan bahwa belum ada dampak sosial ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya ketegasan dalam memberikan sanksi, dan kendala infrastruktur menjadi penyebab ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dengan implementasinya. Penelitian menyarankan perluasan sosialisasi, peningkatan ketegasan dalam penerapan sanksi, dan investasi dalam sarana dan prasarana untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu.</p>	<p>data yang lengkap dari berbagai sumber, memperkuat validitas hasil penelitian. Analisis tahapan yang komprehensif, melibatkan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan verifikasi data, menunjukkan pendekatan yang holistik. Selain itu, relevansi hasil penelitian dengan kebijakan publik dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pengambil kebijakan. Di sisi lain, jurnal ini memiliki kekurangan, termasuk keterbatasan analisis ekonomi-sosial yang mendalam, kurangnya presentasi data numerik yang jelas, dan keterbatasan informasi mengenai kendala serta pemahaman masyarakat terhadap kebijakan. Selain itu, tidak ada tinjauan terhadap hasil kebijakan sebelumnya, yang dapat memberikan konteks lebih lanjut. Meskipun demikian, penilaian kelebihan dan kekurangan tetaplah subjektif dan dapat</p>
--	--	--	--	--	--

					dipengaruhi oleh perspektif pembaca atau peneliti.
4.	Muhammad Ibrahim Sahupala	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi Di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya)	2020	<p>Penelitian ini membahas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, terutama di Kecamatan Indihiang. Penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan analisis deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi peraturan kepada masyarakat dan berkoordinasi dengan instansi terkait, implementasi kebijakan belum optimal. Hambatan melibatkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, kurangnya pengawasan, serta keterbatasan anggaran. Kendala juga muncul dalam komunikasi satu arah dan kurangnya koordinasi dengan SATPOL PP. Sikap para pelaksana di lapangan serta lingkungan ekonomi dan politik yang kurang mendukung juga mempengaruhi implementasi kebijakan. Sebagai solusi, penelitian menyarankan peningkatan komunikasi, koordinasi</p>	<p>Jurnal ini memiliki beberapa kelebihan, seperti menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus yang memberikan pemahaman mendalam terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. Fokus pada lokasi spesifik memberikan wawasan yang relevan, dan identifikasi hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, pengawasan yang kurang, dan keterbatasan anggaran memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan. Namun, kekurangan jurnal mencakup keterbatasan umumisasi karena fokus pada wilayah tertentu, kurangnya data kuantitatif, dan minimnya alternatif solusi yang konkret. Meskipun jurnal mengenali keterbatasan sumber daya sebagai hambatan utama,</p>

				yang lebih baik, dan pemberian motivasi kepada para pelaksana di lapangan.	informasi rinci atau rekomendasi lebih lanjut terkait solusi tidak sepenuhnya dijelaskan.
5.	Yulianto Mokodompis, Markus Kaunang, Ventje Kasenda	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado	2019	Dalam penelitian implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado, beberapa poin penting telah diidentifikasi. Pertama, pertumbuhan penduduk yang cepat di Kota Manado menyebabkan peningkatan volume sampah setiap harinya. Kedua, kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado telah mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat. Ketiga, faktor penghambat utama melibatkan kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah di sungai, kurangnya sarana dan prasarana seperti bank sampah dan TPS 3R, serta penegakan hukum yang kurang optimal. Keempat, kondisi TPA Sumompo yang tidak mampu menampung jumlah sampah yang terus meningkat menjadi permasalahan serius. Kelima, pendekatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado melibatkan Dinas	urnal ini memiliki kelebihan dalam menyajikan analisis mendalam mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado, dengan melibatkan perspektif multi-stakeholder seperti Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kewilayahan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, jurnal ini merujuk pada dasar hukum Peraturan Daerah Kota Manado No. 7 Tahun 2006, memberikan konteks regulasi yang penting. Namun, terdapat beberapa kekurangan, seperti ketidakjelasan mengenai tanggal publikasi yang dapat mempengaruhi relevansi informasi, kekurangan penjelasan tentang metodologi penelitian, dan kurangnya penekanan pada solusi konkret untuk meningkatkan

				<p>Lingkungan Hidup, Pemerintah Kewilayahan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Kesemuanya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Manado No. 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan. Terakhir, aspek teknis pengelolaan sampah melibatkan Standar Operating Procedure (SOP) yang telah disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup, termasuk dalam hal penyapuan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, dan daur ulang sampah.</p>	<p>implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Manado.</p>
6.	Tiwi Okhtafianny, Ria Ariani	Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh	2023	<p>Penelitian ini menyajikan analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan, melibatkan wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumen dengan pihak terkait. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa kendala, termasuk kurang optimalnya komunikasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, terutama latar belakang</p>	<p>Kelebihan dari jurnal ini adalah menyajikan analisis mendalam terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh dengan menggunakan metode kualitatif, terutama pendekatan studi kasus. Melibatkan wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumen memberikan kekayaan data yang relevan dan mendalam. Hasil penelitian mengidentifikasi sejumlah kendala, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dalam penerapan kebijakan tersebut.</p>

				<p>pendidikan yang belum sesuai, dan anggaran yang terbatas. Faktor penghambat lain mencakup penerapan sanksi yang belum efektif, rendahnya kesadaran masyarakat, serta minimnya sosialisasi program. Rekomendasi penelitian menekankan perluasan komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia dan alokasi anggaran, serta kerjasama lintas sektor untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.</p>	<p>Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam penelitian ini. Pertama, cakupan penelitian mungkin terbatas pada wilayah spesifik (Kota Payakumbuh), sehingga generalisasi temuan ke wilayah lain bisa menjadi pembatas. Selain itu, meskipun kendala diidentifikasi, penelitian ini mungkin belum memberikan solusi konkret atau langkah-langkah praktis untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Akhirnya, penelitian ini dapat diperkaya dengan lebih mendalamnya analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan tersebut.</p>
7.	Rahmad Alamin, Suwandi	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Lihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	2023	<p>Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong mengungkapkan beberapa poin kunci. Pertama, dalam aspek komunikasi antar pegawai, terdapat kebijakan rutin seperti apel pagi dan rapat untuk memastikan arah dan pelaksanaan kegiatan harian. Kedua, sumber daya manusia diakui sebagai elemen krusial</p>	<p>Kelebihan jurnal ini antara lain mencakup pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian, menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk mengumpulkan data. Selain itu, dilakukan triangulasi sumber, teknik, dan teori untuk memvalidasi hasil penelitian. Jurnal juga memberikan gambaran yang cukup</p>

			<p>dalam pengelolaan sampah, tetapi penelitian menyoroti kebutuhan akan penambahan personil dan peningkatan sarana prasarana sebagai dampak dari peningkatan timbunan sampah. Ketiga, struktur birokrasi dinilai sesuai dengan SOTK pemerintah daerah, namun pembinaan terhadap pegawai tetap diperlukan. Keempat, peran masyarakat dianggap penting, namun kesadaran mereka terhadap pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan. Kelima, sumber daya anggaran dianggap relatif, tetapi perlu peningkatan untuk pemeliharaan dan peremajaan peralatan serta sarana prasarana yang sudah tua. Keenam, kewenangan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan dinas meraih beberapa penghargaan. Kesimpulannya, meskipun ada keberhasilan dalam implementasi kebijakan, diperlukan upaya lebih lanjut, termasuk peremajaan sarana prasarana, peningkatan sumber daya manusia, dan peningkatan kesadaran masyarakat, untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang lebih optimal. Saran yang</p>	<p>komprehensif tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong dengan melibatkan berbagai aspek seperti komunikasi antar pegawai, sumber daya manusia, struktur birokrasi, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan.</p> <p>Namun, jurnal ini memiliki beberapa kekurangan. Pertama, jumlah informan yang terlibat dalam penelitian relatif sedikit (5 orang), sehingga mungkin tidak mencakup seluruh diversitas pandangan yang ada. Kedua, tidak disediakan informasi yang memadai tentang karakteristik responden, seperti latar belakang pendidikan atau jabatan, yang dapat mempengaruhi pandangan mereka. Ketiga, tidak terdapat analisis statistik yang mendalam, karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Keempat, waktu penelitian tidak dijelaskan secara rinci, sehingga sulit untuk menilai sejauh mana hasil penelitian mencerminkan situasi yang aktual. Oleh</p>
--	--	--	---	--

				diusulkan mencakup peremajaan alat operasional, peningkatan jumlah personil, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.	karena itu, jurnal ini dapat ditingkatkan dengan memperluas jumlah informan, memberikan informasi lebih rinci tentang responden, dan memberikan analisis statistik yang lebih mendalam untuk mendukung temuan kualitatifnya.
8.	Mutia Riksfardini, Qiqi Asmara	Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Laut Di Wilayah Pesisir Muara Angke Jakarta Utara	2023	Penelitian ini menyoroti implementasi kebijakan penanganan sampah laut di Muara Angke, Jakarta Utara, khususnya pada kampung nelayan pesisir. Fokus utama penelitian adalah pada permasalahan serius pencemaran laut oleh sampah plastik dan sampah medis, yang dipicu oleh kurangnya efektivitas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional penanganan sampah laut dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya masuknya sampah ke laut. Melalui metode kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan oleh Grindle yang mencakup Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi. Temuan penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan yang ada memiliki kepentingan yang sesuai, dampak positif	Kelebihan jurnal ini terletak pada fokusnya yang mendalam terhadap implementasi kebijakan penanganan sampah laut di Muara Angke, Jakarta Utara, dengan mengeksplorasi permasalahan utama seperti pencemaran laut oleh sampah plastik dan sampah medis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara, observasi, dan dokumentasi, memberikan pemahaman mendalam tentang situasi di lapangan. Penelitian juga memperkuat analisis dengan merujuk pada teori model implementasi kebijakan oleh Grindle. Keberhasilan penelitian ini terletak pada identifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan penanganan sampah laut, memberikan

				<p>dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah, namun perubahan yang diinginkan belum mencapai target yang diinginkan. Pelaksanaan program diupayakan dengan baik, namun sumber daya masih menjadi kendala, dan tingkat kepatuhan serta respon masyarakat perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan urgensi untuk meningkatkan efektivitas program reward dan punishment, melakukan advokasi masyarakat terkait regulasi perlindungan laut, dan lebih fokus pada program pencegahan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas.</p>	<p>gambaran yang komprehensif.</p> <p>Namun, beberapa kelemahan juga dapat diidentifikasi dalam jurnal ini. Pertama, penelitian mungkin lebih dapat diterima jika mencakup analisis kuantitatif atau data statistik untuk mendukung temuan kualitatifnya. Kedua, penelitian ini dapat lebih menguraikan langkah-langkah konkret atau rekomendasi tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah atau pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penanganan sampah laut. Selain itu, jurnal ini dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap bahaya masuknya sampah ke laut. Dengan mengatasi kekurangan tersebut, jurnal ini dapat menjadi lebih holistik dan memberikan kontribusi yang lebih substansial terhadap literatur kebijakan penanganan sampah laut.</p>
--	--	--	--	--	--

9.	Susanti Alfira Takaluhude, Ronny Gosal, Ventje Kasenda	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe Studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna	2022	<p>Dalam penelitian mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe, beberapa temuan penting mencakup tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap kebersihan dan peningkatan sampah yang tidak terkontrol seiring pertumbuhan populasi. Penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe belum optimal, terutama di beberapa kelurahan. Faktor-faktor implementasi kebijakan, seperti komunikasi yang tidak optimal, keterbatasan sumber daya, disposisi yang belum serasi, dan struktur birokrasi yang terkoordinasi baik, menjadi hal yang mempengaruhi hasil implementasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori implementasi George Edward III. Pembahasan hasil penelitian mencakup analisis komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dengan fokus pada kebijakan pengelolaan sampah. Rekomendasi penelitian mencakup penguatan komunikasi, peningkatan sumber daya, dan koordinasi</p>	<p>Jurnal ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain penggunaan pendekatan kualitatif yang mendalam untuk memahami permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Analisis implementasi kebijakan dengan teori George Edward III memberikan wawasan yang signifikan dalam mengidentifikasi hambatan dan faktor kritis yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Selain itu, jurnal ini memberikan rekomendasi konkret seperti penguatan komunikasi, peningkatan sumber daya, dan koordinasi antarlembaga, memberikan landasan bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Namun, kelemahannya terletak pada fokus penelitian yang terbatas pada lokasi tertentu, Kabupaten Kepulauan</p>
----	--	---	------	---	---

				antarlembaga untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Sangihe.	Sangihe, sehingga temuannya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi ke wilayah lain. Selain itu, kurangnya data kuantitatif dan analisis mendalam mengenai ketidakefektifan penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat menjadi keterbatasan yang perlu dipertimbangkan.
10.	Anton Budi Dharma, Delpi Susanti, dan Pebriana Marlinda	Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah Di Kota Dumai	2023	Jurnal tersebut menggarisbawahi beberapa poin penting terkait dengan peran Bank Sampah dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah (SIMBA) dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Dumai. Pertama, Bank Sampah dianggap sebagai wadah efektif dengan prinsip 3R untuk mengelola sampah, memfasilitasi edukasi, perubahan perilaku, dan mendorong ekonomi sirkuler. Kedua, SIMBA, berbasis aplikasi dbase dan web, diimplementasikan untuk mengubah perilaku masyarakat, meningkatkan pemilahan sampah, dan mengoptimalkan potensi ekonomi kerakyatan. Namun, penelitian juga mengidentifikasi faktor	Kelebihan jurnal ini antara lain mengenai penekanan pada pentingnya Bank Sampah sebagai solusi untuk mengelola sampah secara efektif dengan prinsip 3R (Reuse, Reduce, Recycle). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah (SIMBA) di Kota Dumai, yang didukung oleh aplikasi dbase dan web, juga dianggap sebagai solusi inovatif untuk mengubah perilaku masyarakat, meningkatkan pemilahan sampah, dan menggerakkan potensi ekonomi kerakyatan. Jurnal ini memberikan gambaran mendalam tentang permasalahan sampah di Kota Dumai dan upaya konkret yang diambil dalam

				<p>penghambat, terutama terkait kompleksitas perubahan perilaku masyarakat dan kurangnya kesadaran dalam pemilahan sampah. Oleh karena itu, disarankan adanya dukungan pemerintah, termasuk bantuan dana, sarana-prasarana, pelatihan, serta regulasi yang lebih kuat terkait kewajiban pemilahan sampah oleh masyarakat. Implementasi SIMBA diharapkan dapat berjalan lebih optimal dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik, melibatkan seluruh elemen masyarakat, badan usaha, dan instansi pemerintah, guna mencapai tujuan pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan di Kota Dumai.</p>	<p>implementasi program Bank Sampah dan SIMBA.</p> <p>Namun, jurnal ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, terdapat keterbatasan dalam mencapai optimalitas program Bank Sampah dan SIMBA, yang disebabkan oleh kompleksitas perubahan perilaku masyarakat dan kurangnya kesadaran dalam pemilahan sampah. Kedua, walaupun disebutkan faktor penghambat, tidak dijelaskan dengan rinci tentang bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi program. Terdapat kekurangan informasi terkait dengan evaluasi dampak dari SIMBA terhadap perubahan perilaku masyarakat dan efektivitas pengelolaan sampah secara keseluruhan. Lebih lanjut, jurnal tidak memberikan gambaran tentang tantangan teknis atau hambatan praktis yang mungkin muncul selama implementasi SIMBA.</p>
--	--	--	--	--	--

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu adalah, peneliti menekankan pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Pilihan terhadap fokus tersebut didasarkan pada fakta bahwa pengelolaan sampah di Alun-alun aimas kabupaten sorong masih belum efektif jika dibandingkan dengan kota- kota lainnya yang ada di Indonesia. Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten sorong juga belum dapat berjalan secara maksimal.

2.6 Definisi Konsepsional dan Oprasional Variabel

2.6.1 Definisi Konsepsional

Definisi konseptual merupakan proses pemberian definisi teoritis atau konsepsional pada suatu konsep. Definisi konsepsional ini suatu definisi dalam bentuk yang abstrak. Berikut adalah penjelasan dari definisi Konsepsional penelitian ini

1. Implementasi

Definisi Konsepsional: tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mencapai tujuan yang diinginkan. implementasi memiliki proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: 1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan, 2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, 3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.

2. Faktor keberhasilan implementasi kebijakan

Definisi Konseptual: faktor keberhasilan implementasi kebijakan menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah atau pemangku kepentingan lain. Dengan ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau masyarakat dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut. Hal ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi dari berbagai pihak dalam proses implementasi kebijakan untuk mencapai hasil yang optimal.

3. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Definisi Konseptual: Secara konseptual didefinisikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Dinas ini berada di bawah naungan Pemerintah Daerah dan memiliki tugas dan fungsi dalam mengatur, mengawasi, dan mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup biasanya memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala dinas, sekretariat, bidang-bidang, dan unit-unit kerja yang bertugas dalam menjalankan tugas dan fungsi dinas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

4. Pengelolaan Sampah

Definisi konseptual : Secara konseptual didefinisikan Pengelolaan sampah merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan sampah secara efisien dan bertanggung jawab. Pendekatan konseptual menekankan pentingnya memandang sampah sebagai sumber daya yang dapat di daur ulang atau dimanfaatkan kembali, serta upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan melalui pengurangan, daur ulang, dan pengelolaan sampah organik. Konsep ini juga mencakup strategi untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan.

Oprasional Variabel

2.6.2 Definisi Oprasional

No	Variabel	Definisi Oprasional	Indikator
1	Implementasi	<p>Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap (Haji, 2020).</p> <p>Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan terhadap keputusan sebelumnya. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan. 2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana. 3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan. 4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak. 5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana. 6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. 	<p>Indikator dari implementasi dalam konteks umum adalah penanda atau metric yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program, rencana, atau kebijakan telah dijalankan atau diimplementasikan . berikut beberapa indikator yang digunakan dalam implementasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu : penilaian ini melihat apakah tahapan-tahapan pada pelaksanaan sistem atau kebijakan berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. 2. Efektivitas : mengevaluasi seberapa efektif implementasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan. 3. Efisiensi : mengukur seberapa efisien sumber daya (seperti waktu, anggaran. dan manpower yang digunakan dalam proses implementasi. 4. keberlanjutan : mengukur kemampuan implementasi dalam mempertahankan hasil positif dalam jangka panjang.
2	Faktor keberhasilan implementasi kebijakan	<p>Faktor keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isu atau <i>content</i> kebijakan 2. Implementor dari kelompok target 3. Lingkungan 	<p>Indikator dari faktor keberhasilan implementasi kebijakan mencakup beberapa aspek penting meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan dan penerimaan : sejauh mana target kebijakan dan pihak terkait mematuhi dan menerima kebijakan tersebut. 2. adaptabilitas dan fleksibilitas : kemampuan kebijakan untuk diadaptasi atau dimodifikasi berdasarkan umpan balik dan kondisi yang berubah merupakan indikator penting keberhasilan implementasi 3. dampak sosial dan lingkungan : mengukur dampak positif atau negatif dari kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk aspek kesehatan, sosial, dan ekologi.

3	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	<p>Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p> <p>Pasal 2 PP No 38 th 2007 menyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan atau susunan pemerintahan, dan salah satu contohnya adalah bidang lingkungan hidup. Lebih lanjut, Pasal 3 Peraturan daerah No 4 Tahun 2017 menyatakan bahwa DLH menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.</p>	<p>Indikator dinas lingkungan hidup mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Salah satunya yaitu pengelolaan sampah : tingkat efektivitas pengelolaan sampah, termasuk pengurangan sampah, pemilahan sampah, dan persentase sampah yang berhasil di daur ulang.</p> <p>Dinas lingkungan hidup dapat mengidentifikasi masalah lingkungan secara dini dan mengembangkan strategi yang tepat untuk menanggulangnya.</p>
4	Pengelolaan sampah	<p>sampah sebagai sumber daya yang dapat di daur ulang atau dimanfaatkan kembali, serta upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan melalui pengurangan, daur ulang, dan pengelolaan sampah organik. Konsep ini juga mencakup strategi untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Dengan ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.</p>	<p>Indikator pengelolaan sampah adalah parameter atau kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi proses pengelolaan sampah dalam suatu area atau komunitas. Indikator ini dapat mencakup berbagai aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan sampah : tingkat keberhasilan dalam pemisahan sampah organik dan anorganik oleh masyarakat atau sistem pengumpulan serta fasilitas dan infrastruktur yang mendukung proses pemisahan tersebut. 2. pemisahan sampah: tingkat keberhasilan dalam pemisahan sampah organik dan anorganik oleh masyarakat atau sistem pengumpulan yang mendukung proses pemisahan sampah tersebut. 3. pengelolaan sampah: program atau kegiatan yang bertujuan untuk mengelola volume sampah yang dihasilkan.

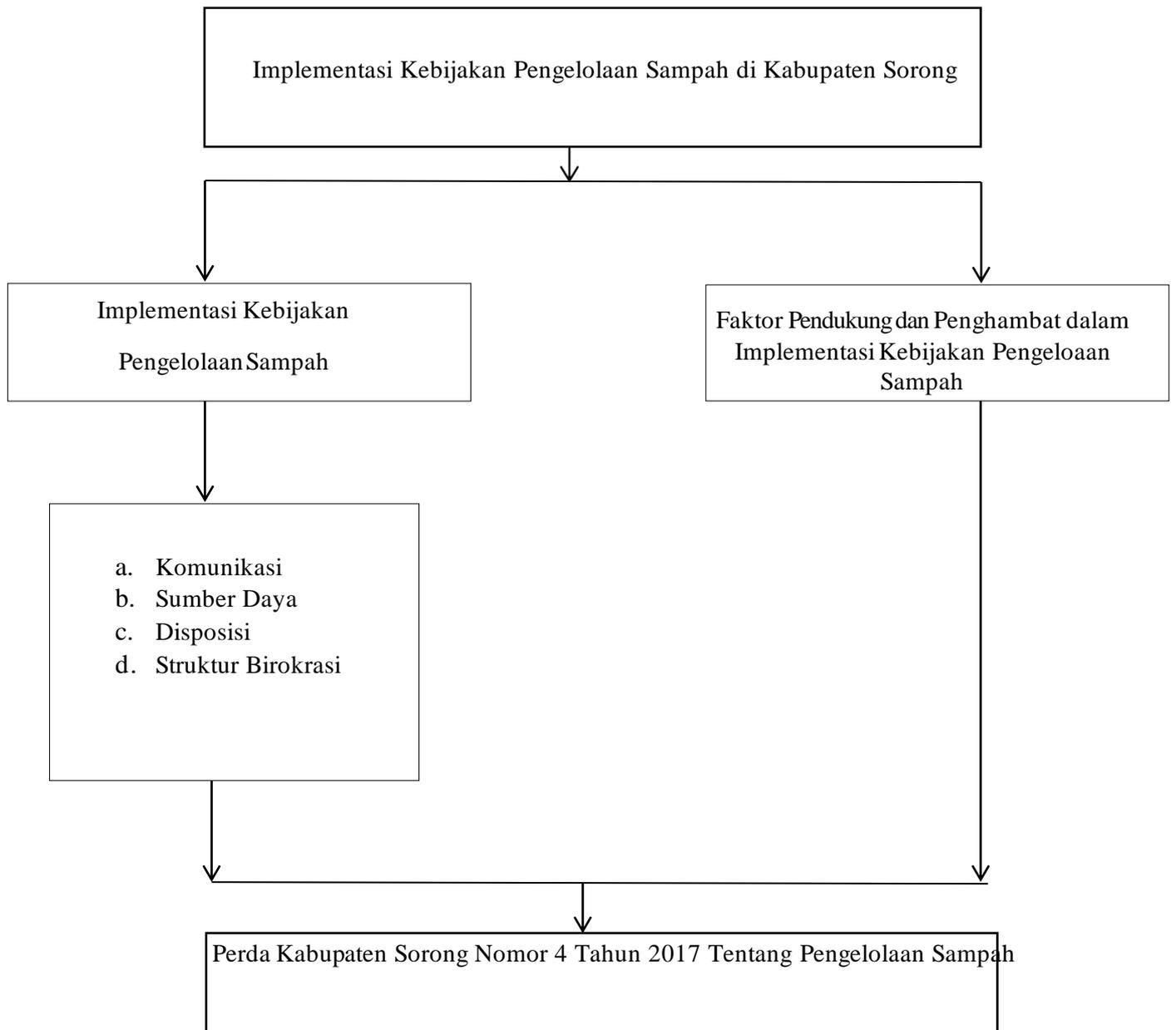
			4.daur ulang sampah: persentase sampah yang berhasil didaur ulang dari total sampah yang dihasilkan, fasilitas daur ulang yang tersedia, serta kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program daur ulang.
--	--	--	---

2.7 Kerangka Berpikir

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai pedoman pengelolaan sampah di Indonesia, ditekankan bahwa sampah telah menimbulkan permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Disadari bahwa sampah sebagai buangan dari aktifitas domestik, komersil maupun industri tidak dapat dihindari. Kecenderungannya bahkan semakin kompleks dan meningkat kuantitasnya sejalan dengan perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu, pertumbuhan jumlah penduduk maupun dinamika kehidupan masyarakat, serta tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam upaya mengurangi sampah dari tingkat sumber sampai pengelolaan sampah itu sendiri.

Kerangka berpikir adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metedologi, serta

penggunaan teori dalam penelitian. Berdasarkan pemaparan di atas kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1. Bagan Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata (2009), metode kualitatif adalah penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial Creswell (2015).

Melalui metode kualitatif peneliti pada tahap awal melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat ditemukan hipotesis yang berupa hubungan gejala dalam hal ini dengan memberikan gambaran dan analisis secara mendalam. Penelitian deskriptif kualitatif adalah pilihan peneliti karena tujuan peneliti yaitu ingin mendapatkan data untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah di Alun-alun Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley dalam buku Sugiyono (2019:275) menyatakan bahwa fokus penelitian adalah domain tunggal ataupun beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Sesuai dengan penelitian ini maka peneliti

menetapkan fokus penelitian berdasarkan nilai temuan serta berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori dan informan, yaitu :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang berkunjung di Alun-alun Aimas terhadap kebersihan lingkungan.
2. Adanya anggapan masyarakat bahwa kebersihan lingkungan di Alun-alun Aimas menjadi tugas dan tanggung jawab petugas kebersihan.
3. Rasa tanggung jawab dan sikap kemandirian yang kurang karena masyarakat yang berkunjung di Alun-alun Aimas belum memahami bagaimana cara menumbuhkan kesadaran mengenai membuang sampah pada tempatnya.

3.3 Lokasi dan waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Menurut Hamid Damadi (2011:52) Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Menurut Wiratna Sujarweni (2014:73) Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Menurut Sugiyono (2018:532) Lokasi penelitian merupakan tempat di mana situasi sosial tersebut berkaitan dengan sasaran atau permasalahan yang akan diteliti. Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana suatu penelitian dilakukan, penetapan suatu lokasi penelitian merupakan tahapan penting dalam penelitian, karena dengan di tetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam peneliti melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian yang di pilih oleh peneliti adalah di Alun-alun Aimas dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sorong. Alasan Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di tempat

tersebut karena peneliti berasal dari wilayah atau daerah tersebut dan cukup mengetahui kondisi lingkungan Alun-alun Aimas yang menjadi tujuan penelitian.

3.3.2 Waktu Penelitian

Menurut Sugiyono tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa lama penelitian dilaksanakan. Tetapi lamanya penelitian akan tergantung pada keberadaan sumber data dan tujuan penelitian. Selain itu juga akan tergantung cakupan penelitian, dan bagaimana penelitian mengatur waktu yang digunakan. Adapun lokasi waktu yang digunakan untuk penelitian ini, dilaksanakan dalam waktu 6 bulan dengan tahapan dua bulan pertama observasi, diawali penyusunan proposal dan seminar proposal, dua bulan kedua adalah melaksanakan tahapan penelitian yang meliputi penggalian data dan analisis data, dua bulan ketiga tahapan laporan hasil penelitian dan konsultasi skripsi.

3.3.3 Interview Wawancara

Interview atau wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan dari penelitian. Beberapa tujuan penting dari proses interview antara lain: untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu, untuk melengkapi suatu penelitian ilmiah, dan untuk memperoleh data. Selain untuk kebutuhan penelitian, interview juga merupakan salah satu tahapan yang dilakukan saat melamar kerja, dimana perusahaan berusaha mendapatkan informasi secara langsung dari pelamar kerja.

Menurut Sugiyono (2015), Wawancara adalah terjadinya pertemuan yang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bertukar informasi melalui metode cara tanya jawab yang mampu menghasilkan makna dalam topik penelitian yang diajukan.

Adapun untuk berbagai tahapan yang harus dilakukan dalam wawancara sebagai teknik pengumpulan data di penelitian. Antara lain:

1. Menyusun pedoman pertanyaan wawancara, yang tujuannya agar pertanyaan yang diberikan sesuai dengan topik penelitian yang dibuat
2. Menentukan narasumber pada saat wawancara, yang bisa digolongkan sebagai narasumber inti, tambahan, dan utama
3. Terlebih dahulu menentukan lokasi dan waktu wawancara
4. Melakukan proses wawancara
5. Melakukan dan membuat dokumentasi
6. Memastikan hasil wawancara sesuai dengan informasi yang dibutuhkan
7. Merekap hasil wawancara yang telah diperoleh
8. Membuat transkrip wawancara untuk kemudian dituliskan dalam hasil penelitian.

3.4 Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.4.1 Data Primer

Data primer Menurut Sugiyono (2010) yang menyatakan bahwa Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer pada penelitian ini adalah data yang dikumpulkan secara langsung berupa hasil kuesioner responden mengenai Implementasi Kebijakan Dinas

Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah di Alun-alun Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2010) adalah Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, melalui orang lain atau melalui dokumen. data sekunder diperoleh atau yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan sampah di Alun-alun Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya, melalui buku-buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2016:230) merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Karena observasi tidak selalu dengan obyek manusia tetapi juga obyek yang lain seperti dokumen, literatur dan pengamatan langsung oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian ini, penulis akan melakukan observasi terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kabupaten Sorong.

3.5.2 Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg dalam Sugiyono (2016:233) mengemukakan beberapa macam wawancara salah satunya adalah wawancara semi terstruktur (pelaksanaan wawancara lebih bebas, dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana responden dimintai pendapat dan ide-idenya), yang ditujukan kepada informan yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Bidang Pengolaan Sampah dan Limbah B3, Kasi Penanganan Sampah, Petugas Lapangan dan Masyarakat.

3.5.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen, baik dokumenter tulis maupun dokumen tak tertulis seperti foto, gambar dan elektronik. Dokumen-dokumen tersebut dipilih sesuai dengan kajian penelitian yang sifatnya sebagai bukti autentik selama proses penelitian berlangsung.

3.6 Teknik Analisis Data

Moleong (2008) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada paparan kalimat, sehingga lebih mampu memahami kondisi psikologi manusia yang kompleks (dipengaruhi oleh banyak fakta) yang tidak cukup, apabila hanya diukur dengan menggunakan skala saja. Hal ini terutama didasari oleh asumsi bahwa manusia merupakan *animal symbolicum* (makhluk simbolis) yang mencari makna dalam hidupnya. Sehingga penelitian ini memerlukan peran kualitatif guna melihat manusia secara total.

Tujuan analisis data kualitatif agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antar semantis sangat penting karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

Menurut Miles, Huberman & Saldana (2014), terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Teknik analisis data kualitatif sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan

sebagai kuantifikasi data. menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

Menurut Miles, Huberman & Saldana (2014), terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Teknik analisis data kualitatif sebagai berikut :

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ada yang mengutarakan memfokuskan pada kalimat dan ada juga yang menjelaskan mengenai makna variabel dalam sesuatu.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sorong

Jika tidak ada upaya dan penanganan dari pemerintah Kabupaten sorong, akan berdampak buruk pada kondisi lingkungan. Oleh sebab itu Pemerintah kabupaten sorong mengeluarkan peraturan daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Perda ini berisi suatu aturan, kebijakan, dan panduan pelaksanaan untuk dinas terkait atau pihak yang berhubungan dengan masalah sampah. Bagi para pelaksana kebijakan, Perda tersebut sebagai mandat untuk menjalankan Program Pengelolaan Sampah di kabupaten sorong. Adapun beberapa indikator mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten sorong yaitu:

- a) **Ketepatan waktu** dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten sorong adalah krusial karena dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi program-program pemerintah. Hal ini melibatkan pengaturan jadwal yang baik, pemenuhan tenggat waktu, dan koordinasi yang efisien antara berbagai pihak terkait. Kesesuaian waktu juga membantu dalam menjaga momentum dan dukungan dari dinas terkait kepada masyarakat.

Data Primer

Dalam hasil wawancara ketepatan waktu dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten sorong menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Bapak Agustinus Assem, SH.Msi mengatakan bahwa dari tindakan yang telah dilaksanakan dengan tepat waktu dalam jadwal pengangkutan sampah, dinas lingkungan hidup kabupaten sorong telah menunjukkan komitmen yang baik. berbagai upaya dan program-program dilaksanakan secara maksimal. komitmen inilah yang menjadi harapan positif untuk sukses dan tercapainya tujuan-tujuan kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten sorong.

- b) **Efektivitas** dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten sorong mempunyai beberapa aspek yaitu kesesuaian dengan peraturan dan Kebijakan pengelolaan sampah harus konsisten dengan peraturan dan kebijakan yang ada di tingkat nasional, regional, dan lokal. Hal ini memastikan bahwa implementasi dapat dijalankan secara sah dan terkoordinasi. partisipasi dan keterlibatan masyarakat efektivitas kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengelolaan sampah. Partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan tingkat keberhasilan implementasi, implementasi kebijakan memerlukan pendanaan yang cukup untuk membangun dan menjaga infrastruktur, serta menyediakan pelatihan bagi staf yang terlibat, edukasi dan kesadaran masyarakat program edukasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, termasuk pemilahan sampah di sumbernya, kemitraan dan kolaborasi kerja sama antara pemerintah, swasta, dan organisasi non-pemerintah dapat memperkuat implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efisien.

Hasil analisa penulis dengan memperhatikan semua aspek ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah untuk mencapai tujuan berkelanjutan dalam pengelolaan limbah.

- c) **Efisiensi** dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten sorong mencakup berbagai hal yang harus diperhatikan untuk memastikan penggunaan sumber daya yang optimal dan hasil yang maksimal. Berikut adalah beberapa faktor utama untuk mencapai efisiensi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah perencanaan yang matang perencanaan yang baik menjadi dasar untuk efisiensi implementasi kebijakan. Ini termasuk penentuan tujuan yang jelas, strategi yang tepat, dan alokasi sumber daya yang sesuai, Optimalisasi Infrastruktur memastikan bahwa infrastruktur pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir (TPA), instalasi daur

ulang, dan fasilitas pengolahan sampah, dikelola dengan baik, pengelolaan keuangan yang bijak mengelola anggaran dengan efisien untuk memastikan dana yang cukup tersedia untuk infrastruktur, pelatihan staf, program edukasi masyarakat, dan monitoring dan evaluasi, Pendidikan dan kesadaran masyarakat Investasi dalam program edukasi dan kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku konsumsi dan pembuangan sampah dapat mengurangi beban sampah dan meningkatkan efisiensi dalam proses pengelolaan sampah, monitoring dan evaluasi berkelanjutan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur kemajuan, mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, dan menyesuaikan strategi jika diperlukan agar implementasi tetap efisien.

Data Primer

Dalam hasil wawancara efisiensi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah Menurut Bapak Agustinus Bless, ST mengatakan bahwa sumber daya manusia pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten sorong secara jumlah sudah dikatakan cukup. Sebab satu beban masalah di ampu oleh institusi yang berkontribusi dalam penyediaan sumber daya manusia. Namun demikian, yang menjadi masalah adalah dari aspek keahlian yang masih kurang. Beberapa hal masih nampak di beberapa di TPS belum mampu mengoptimalkan peralatan untuk mengelola sampah. Sehingga hal ini menjadi salah satu hambatan.

Berikut adalah beberapa poin analisa penulis terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten sorong. regulasi dan kebijakan sampah biasanya mencakup regulasi terkait pemilahan, pengumpulan, transportasi, dan pengolahan sampah. Penting untuk menganalisis sejauh mana kebijakan ini diimplementasikan secara efektif oleh pemerintah dan dinas terkait. keberhasilan implementasi sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti tempat pembuangan akhir (TPA), fasilitas daur ulang, dan sistem pengangkutan sampah yang efisien. keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah di kabupaten sorong memerlukan partisipasi yang aktif dalam praktik pemilahan sampah dan penggunaan layanan pengelolaan sampah yang disediakan. Analisis dapat fokus

pada sejauh mana masyarakat terlibat, tingkat kesadaran masyarakat, serta tantangan-tantangan sosial dan budaya yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Penting untuk menganalisis sistem pengawasan dan evaluasi yang diterapkan untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan, efektivitas strategi yang diimplementasikan, serta hasil dari kebijakan pengelolaan sampah dalam mencapai tujuan lingkungan yang bersih. dapat dievaluasi sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah dapat berhasil diimplementasikan dan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan.

Data Primer

Hasil wawancara Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Bapak Agustinus Assem,SH.M.si mengatakan bahwa Konsep dasar pengelolaan sampah dalam perda tersebut merujuk pada hirarki pengelolaan sampah, mencakup pencegahan dan pengurangan sampah dari sumber yang kemudian dimanfaatkan kembali oleh masyarakat ataupun oleh pihak TPA. Pencegahan dan pengurangan sampah dari sumber dilakukan dengan mereduksi timbunan sampah, penggunaan barang atau bahan yang bisa digunakan kembali, dan pemanfaatan bahan daur ulang. Pemanfaatan kembali sampah dilakukan baik pada jenis sampah organik maupun anorganik. TPA yang ada di kabupaten sorong bertempat di Mariat Gunung KM 32 memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah karena pada akhirnya akan tetap ada sampah yang memang sudah tidak bisa dimanfaatkan secara ekonomis sehingga harus dibuang ke TPA.

Data Skunder

Kabupaten sorong memiliki tempat pembuangan akhir di mariat gunung KM 32 aimas, Berikut adalah hasil dokumentasi tempat pembuangan akhir.



Gambar 4.1 Tempat Pembuangan Akhir di Mariat Gunung KM 32

4.2 Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Faktor keberhasilan implementasi kebijakan menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah atau pemangku kepentingan lain. Dengan ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau masyarakat dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut. Hal ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dan partisipasi dari berbagai pihak dalam proses implementasi kebijakan untuk mencapai hasil yang optimal. Adapun ada beberapa indikator mengenai implementasi kebijakan faktor keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut:

- a) **kepatuhan dan penerimaan** memiliki peran yang penting terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Berikut adalah beberapa poin mengenai kedua hal tersebut kepatuhan mengacu pada sejauh mana individu atau kelompok mematuhi peraturan, kebijakan, atau aturan yang telah ditetapkan. kepatuhan yang tinggi membantu dalam menjaga konsistensi dan efektivitas implementasi

kebijakan. tanpa kepatuhan, kebijakan mungkin tidak akan berfungsi sebagaimana yang direncanakan.

Penerimaan merujuk pada dukungan atau persetujuan dari individu atau kelompok terhadap kebijakan atau perubahan yang diimplementasikan.

Data Primer

Hasil wawancara Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Ibu Anie Sakti, IEK, S.si mengatakan bahwa kegiatan pengelolaan sampah di kabupaten sorong telah dijalankan sebagaimana amanat perundang-undangan dan peraturan yang berlaku pemerintah kabupaten sorong mengatur pengelolaan sampah yang dilaksanakan berdasarkan pada asas keberlanjutan, kemanfaatan, kesadaran, kebersamaan dan nilai ekonomi yang dapat diraih.

Berikut analisa penulis kepatuhan dan penerimaan untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan, penting untuk memperhatikan baik kepatuhan maupun penerimaan. Keduanya saling terkait dan dapat saling memperkuat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan tidak hanya dilaksanakan dengan baik tetapi juga didukung secara luas oleh dinas yang terlibat. kepatuhan maupun penerimaan dapat dikelola dengan baik selama proses implementasi, organisasi atau dinas terkait dapat meningkatkan peluang untuk mencapai keberhasilan dalam menerapkan kebijakan yang direncanakan.

b) Adaptabilitas dan Fleksibilitas

Adaptabilitas dan fleksibilitas merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan atau strategi. kedua konsep ini sangat penting untuk menghadapi perubahan lingkungan dan dinamika yang terus berubah. Berikut adalah analisis lebih lanjut tentang adaptabilitas dan fleksibilitas dalam konteks implementasi Pentingnya Keseimbangan Antara adaptabilitas dan fleksibilitas Saling Mendukung adaptabilitas memungkinkan untuk menanggapi perubahan yang tidak terduga, sementara fleksibilitas memungkinkan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lokal atau preferensi stakeholder, optimasi hasil kombinasi yang baik antara kedua faktor ini dapat menghasilkan implementasi kebijakan yang lebih

efektif dan berkelanjutan, oengelolaan resiko adaptabilitas dan fleksibilitas juga membantu dalam mengelola resiko yang mungkin muncul selama implementasi, seperti perubahan kebijakan atau kondisi pasar yang tidak terduga.

Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan, penting untuk mempertimbangkan dan mengintegrasikan baik adaptabilitas maupun fleksibilitas sebagai bagian dari strategi implementasi. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan untuk mengakomodasi kebutuhan beragam stakeholder akan meningkatkan peluang keberhasilan implementasi kebijakan yang direncanakan.

Data Primer

Hasil wawancara Menurut Ibu Anie Sakti, IEK,S.si mengatakan bahwa memahami kondisi di kabupaten sorong memiliki luas wilayah 13.072km dari hari ke hari pertumbuhan penduduk tentunya membutuhkan pemikiran karena bebrapa dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan pembangunan harus mendapat penanganan lebih serius. Dinas lingkungan hidup telah mengacu pada peraturan daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah di kabupaten sorong. Adapun permasalahan persampahan yang ada di kabupaten sorong yaitu:

1. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam membuang sampah.
2. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan kebersihan masih rendah.
3. Kesadaran pengunjung alun-alun aimas masih rendah terhadap pentingnya membuang sampah pada tempatnya.

c) Dampak Sosial dan Lingkungan

Dampak Sosial Lingkungan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Lingkungan yang efektif dapat membantu dalam perlindungan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan pengendalian polusi, yang mendukung keberlanjutan lingkungan, kebijakan perubahan iklim yang ambisius dan terkoordinasi dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, mendorong penggunaan energi terbarukan, dan

meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan, kebijakan yang mempromosikan penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dapat membantu mempertahankan produktivitas sumber daya alam jangka panjang, kebijakan lingkungan yang baik juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat dengan mengurangi risiko paparan terhadap polutan lingkungan yang berbahaya, Pentingnya melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan kelompok lingkungan, dalam perumusan dan implementasi kebijakan lingkungan untuk memastikan penerimaan dan dukungan yang lebih besar.

Data Primer

Hasil wawancara Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Bapak Agustinus Assem, SH.Msi mengatakan bahwa dari tindakan yang telah dilaksanakan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong telah menunjukkan komitmen yang baik. Berbagai upaya dan program-program dilaksanakan secara maksimal. Komitmen ini lah yang menjadi harapan positif untuk sukses dan tercapainya tujuan-tujuan kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten sorong.

Data Skunder

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLs) sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLs)

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implementasi terhadap pelayanan SKPD	Catatan bagi perumusan program dan kegiatan SKPD
Dampak dan resiko lingkungan hidup	Kurangnya kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya, pembuangan sampah oleh masyarakat sebagian besar belum pada tempatnya.	SKPD yang terkait dalam penanganan persampahan diharapkan melakukan tindakan konkrit yang signifikan untuk meminimalisir dampak dan resiko yang ditimbulkan	Setiap program yang dirumuskan harus mengkomodir isi-isu terkait persampahan.

Hasil Analisa penulis sebagai berikut analisa Dampak sosial dan lingkungan harus diperhitungkan secara cermat dalam merencanakan dan mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten sorong. kebijakan yang berhasil tidak hanya menghasilkan perubahan positif dalam masyarakat dan lingkungan tetapi juga mempertimbangkan keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan. dengan memahami dampak-dampak ini, pemerintah, organisasi, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam implementasi kebijakan yang mereka rencanakan.

4.2 Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Dinas Lingkungan Hidup adalah sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di suatu wilayah. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa tanggapan masyarakat terhadap aspek-aspek pengelolaan sampah.

- a) **Pengelolaan sampah** masyarakat umumnya mengharapkan adanya sistem pengelolaan sampah yang efisien dan teratur. masyarakat ingin melihat sampah-sampah dibersihkan secara teratur dari lingkungan mereka untuk menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat, pengumpulan sampah: ketersediaan layanan pengumpulan sampah yang terjadwal dan konsisten sangat penting bagi masyarakat. Ketersediaan layanan ini dapat menyebabkan akumulasi sampah di tempat-tempat umum bisa menjadi masalah kesehatan dan estetika.
- b) **Pemisahan sampah** masyarakat cenderung semakin sadar akan pentingnya pemisahan sampah di sumber. masyarakat mendukung sistem yang memungkinkan pemisahan sampah organik, non organik, dan bahan berbahaya secara efektif, serta memberikan edukasi tentang cara yang tepat untuk melakukannya.

- c) **Daur ulang sampah** ada dukungan yang semakin meningkat dari masyarakat terhadap prinsip daur ulang sampah untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. masyarakat mendukung upaya untuk menduar ulang bahan-bahan seperti kertas, plastik, logam, dan kaca. Dengan memahami tanggapan masyarakat terhadap aspek-aspek pengelolaan sampah, masyarakat dan pemerintah terkait dapat merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga dapat mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif.

Data Primer

Hasil wawancara Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Ibu Anie Sakti, IEK, S.si Mengatakan bahwa kegiatan pengelolaan sampah di Kabupaten sorong, telah dijalankan sebagaimana amanat perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten sorong mengatur pengelolaan sampah yang dilaksan pengelolaan sampah di alun-alun aimas kabupaten sorong dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti kesadaran lingkungan, ketersediaan insfrastruktur, dan kebijakan pemerintah.

Analisa penulis terhadap sampah dikelola agar meningkatnya kualitas lingkungan. salah satu hal yang penting dalam implementasi sebuah kebijakan yaitu isi dari kebijakan itu sendiri. Sebab kebijakan dapat berjalan dengan efektif apabila pelaksanaannya memahami isi yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan, dimana maksud dan tujuan itu dapat dilihat dalam isi kebijakan yang tertuang dalam pasal di dalam peraturan daerah kabupaten sorong Nomor 04 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah.

4.3 Tanggapan Mayarakat Terhadap Pengelolaan sampah di Alun-alun Aimas Kabupaten Sorong

Secara umum, tanggapan masyarakat terhadap sampah sudah dapat ditebak kotor, bau dan menjijikan, sehingga kebanyakan orang memilih untuk menghindari dari keberadaan sampah. Salah satu penyangga sistem biologis tersebut adalah

sampah, yang memiliki definisi sebagai barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar (Basriyanta, 2007). Cara pandangan inilah yang menjadikan salah satu faktor penghambat terciptanya lingkungan yang bersih, indah dan ideal. Ketika melihat sampah yang berada tidak pada tempatnya, membuat masyarakat pun enggan untuk bersentuhan atau memindahkannya ke tempatnya.

Tanggapan masyarakat terhadap pengelolaan sampah di alun-alun aimas kabupaten sorong dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti kesadaran lingkungan, ketersediaan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Berikut adalah beberapa tanggapan masyarakat terhadap aspek-aspek pengelolaan sampah masyarakat umumnya mengharapkan adanya sistem pengelolaan sampah yang efisien dan teratur. masyarakat ingin melihat sampah-sampah dibersihkan secara teratur dari lingkungan mereka untuk menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat, ketersediaan layanan pengumpulan sampah yang terjadwal dan konsisten sangat penting bagi masyarakat. ketersediaan layanan ini dapat menyebabkan akumulasi sampah di tempat-tempat umum bisa menjadi masalah kesehatan dan estetika. masyarakat cenderung semakin sadar akan pentingnya pemisahan sampah di sumber. masyarakat mendukung sistem yang memungkinkan pemisahan sampah organik, non organik, dan bahan berbahaya secara efektif, serta memberikan edukasi tentang cara yang tepat untuk melakukannya. daur ulang sampah ada dukungan yang semakin meningkat dari masyarakat terhadap prinsip daur ulang sampah untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. masyarakat mendukung upaya untuk mendaur ulang bahan-bahan seperti kertas, plastik, logam, dan kaca. dengan memahami tanggapan masyarakat terhadap aspek-aspek pengelolaan sampah, masyarakat dan pemerintah terkait dapat merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga dapat mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif.

Pandangan mengenai sampah sebagai sesuatu hal yang negatif, tidak ada nilai, dan memiliki tujuan hanya untuk dibuang, hal inilah yang menjadikan salah satu

faktor terpenting dalam membentuk paradigma masyarakat tentang sampah. Namun berdasarkan faktanya, sampah yang seringkali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari merupakan hasil dari kegiatan manusia, dan secara otomatis, suka tidak suka harus kita pertanggung jawabkan. Dengan merubah cara berpikir kita, salah satunya dengan memandang keberadaan sampah sebagai sebuah keharusan kewajiban dan tanggung jawab, dengan begitu kita lebih termotivasi untuk menjaga lingkungan. Kemudian cara lain untuk merubah pandangan kita terhadap sampah adalah dengan memunculkan persepsi baru, seperti melihat sampah sebagai peluang menghasilkan keuntungan serta sebagai produk yang dapat didaur ulang. Pengelolaan sampah di Alun-alun aimas kabupaten sorong dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang kesemuanya saling berinteraksi dan mendukung untuk mencapai tujuan.

beberapa poin terkait analisa penulis tanggapan masyarakat terhadap pengelolaan sampah di kabupaten sorong yaitu tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat. Analisa dapat meliputi penilaian terhadap tingkat pengetahuan tentang dampak negatif dari sampah terhadap lingkungan, serta kesadaran akan manfaat dari pemilahan sampah dan pengurangan sampah. Tantangan dan keluhan tanggapan masyarakat juga dapat mencakup terhadap sistem pengelolaan sampah yang ada, seperti ketidaknyamanan dalam pengumpulan sampah, ketidakefisien dalam pengelolaan sampah, atau kekhawatiran terhadap dampak lingkungan.

Masalah-masalah ini perlu diperbaiki atau diselesaikan. Aspek budaya dan sosial juga berpengaruh besar terhadap pengelolaan sampah. Misalnya praktik tradisional dalam pengelolaan sampah atau nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku konsumsi dan pembuangan sampah. Perlu mempertimbangkan faktor-faktor dalam merancang strategi yang sesuai dengan konteks lokal. Dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap tanggapan masyarakat terhadap pengelolaan sampah, pemerintah dan dinas terkait dapat lebih memahami dinamika sosial yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kepatuhan masyarakat.

4.4 Faktor Pendukung dan Penghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Alun-alun aimas kabupaten sorong.

4.4.1 Faktor pendukung

1. Komitmen pemerintah kabupaten sorong

Faktor pendukung merupakan hal yang sangat penting didalam suatu implementasi kebijakan. Karena dengan adanya hal tersebut dapat diketahui beberapa hal yang sangat berpengaruh untuk keberhasilan suatu kebijakan. Sehingga beberapa hal tersebut akan dilakukan guna penyempurnaan kembali agar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi keberhasilan suatu kebijakan. Sesuai dengan peraturan pemerintah daerah kabupaten sorong nomor 4 tahun 2017 menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi, dalam hal ini pemerintah kabupaten sorong melalui dinas terkait memiliki komitmen yang tinggi untuk mengatasi masalah sampah hal tersebut tercerminkan adanya kagian-kajian dan proses valuasi yang mendalam terkait penanganan sampah.

2. Adanya kerja sama antar lembaga pemerintah

Penanganan sampah di kabupaten sorong tidak hanya dibebankan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, melainkan menjadi tanggung jawab dinas lingkungan hidup sebagai pelaksana kebijakan. Kedua dinas ini memiliki fungsinya masing-masing, dan keduanya dalam hal tertentu mampu menjalankan suatu program kebijakan. Mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah daerah, antar lembaga pengelola sampah, dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

4.4.2 Faktor Penghambat

1. Minimnya fasilitas yang tersedia.

Pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah ini menjadi masalah bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten sorong. Masyarakat cenderung memakai cara-cara konvensional dalam menangani permasalahan sampah. Dengan membuang sampah di sungai, atau tempat yang terdapat sampah menumpuk. Kenyataan ini sebagaimana yang peneliti temui di lapangan.

2. Lemahnya peran aktivis lingkungan

Aktivis dan lembaga swadaya masyarakat merupakan infrastruktur sosial yang berfungsi untuk mentransformasi situasi sosial ke arah lebih baik. Lembaga swadaya masyarakat diasumsikan lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mudah untuk melaksanakan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Sehingga Lembaga swadaya masyarakat lebih mudah untuk menggerakkan kegiatan sosial ke arah positif. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten sorong belum ada peran Lembaga swadaya masyarakat dalam beberapa program yang dilaksanakan pemerintah daerah. Tanpa melibatkan masyarakat ataupun Lembaga swadaya masyarakat sebagai subjek kebijakan yang benar-benar aktif. Pengelolaan sampah tentunya bukan hal mudah yang dapat ditangani secara mandiri oleh pemerintah daerah, jika pemerintah daerah kabupaten sorong melibatkan Lembaga swadaya masyarakat dapat di prediksi pemahaman dan kesadaran penanganan sampah di alun-alun aimas dan sekitar kabupaten sorong dapat ditanggulangi oleh edukasi dan sosialisasi yang dilaksanakan aktivis lingkungan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pertama, dari fokus Komunikasi, terdapat dua Dinas yang mendapat mandat dari Kebijakan Pengelolaan sampah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong nomor 04 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Dinas tersebut adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Lingkungan Hidup. Kedua dinas itu, membuat program-program kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sorong.

Kedua, pada fokus Sumber daya, terdapat masalah minimnya sarana dan prasarana dalam penanganan sampah. Minimnya fasilitas ini menghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten Sorong.

Ketiga, dalam fokus Disposisi dimana kedua dinas telah memiliki komitmen yang baik dalam implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sorong. Dalam setiap merancang Program dan kegiatan, para pelaksana kebijakan merujuk pada aturan pokok Kebijakan Pengelolaan Sampah, dan menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Terdapat tujuan kebijakan yang harus diwujudkan oleh Pelaksana Kebijakan. Pelaksanaan kebijakan terdapat dua program-program yang menjadi fokus pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Sampah.

Keempat, Terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses Implementasi Kebijakan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sorong. Faktor pendukung yang peneliti temui di lapangan ada dua, yakni adanya komitmen yang baik dari pelaksana kebijakan untuk menangani permasalahan sampah dan adanya jejaring kerjasama antara pelaksana kebijakan. Adapaun faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah minimnya fasilitas publik untuk penanganan sampah. Fasilitas tersebut terdiri dari ketersediaan tempat pembuangan sementara dan tempat Sampah yang sudah terpilah jenis sampahnya.

5.2 Saran

Pertama, Perlu menggandeng aktifis dan Lembaga swadaya masyarakat Lingkungan di kabupaten sorong dalam aktifitas penanganan sampah. Lembaga swadaya masyarakat sebagai infrastuktur sosial yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dan melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam pengurangan sampah yang di produksi.

Kedua, Menambah alokasi anggaran untuk pembangunan Tempat Pembuangan akhir dan tempat pembuangan sementara di wilayah-wilayah padat penduduk. Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah perlu didukung fasilitas publik yang tersedia. Dengan adanya fasilitas publik, masyarakat akan lebih mudah mendisiplinkan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal tersebut dikarenakan, cara pandang masyarakat yang cenderung apatis, menyerahkan urusan sampah hanya pada negara. belum muncul kesadaran bahwa mengatasi sampah di mulai dari individu.

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Sorong perlu memformulasikan kebijakan-kebijakan yang bersifat berkelanjutan, untuk menggiring masyarakat dalam menjaga sampah tertib dan terjaga dalam model pembuangan sampah. Penerapan konsep 3 R, diperlukan fasilitas dan wadah gerakannya. Jika berjalan dengan baik, maka fungsi pengelolaan sampah akan berjalan secara otomatis mulai dari masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta : CV. Alfabeta
- Abdal, A (2015). *Kebijakan Publik: memahami konsep kebijakan publik* (Absal (ed) (Vol.1) Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmadi, Hamid. 2011. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Etih Henriyani. (2015) . Problematika Dalam Implementasi Kebijakan Publik. *In jurnal ilmiah ilmu pemerintahan* (Vol.1).
- Handoyo, E (2012) Kebijakan Publik Eko Handoyo. *Kebijakan Publik, 1*, 315.
- Kuncoro Sejati, 2009. *Pengelolaan Sampah terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mikro, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Moleong, J. Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja RosdaKarya
- Manurung, Mandala (et all). 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan perkembangannya*. Jakarta: UI-Press.
- Manik, Karden E. Sontang. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Jakarta): Djambatan, 2009).
- Milles, M B, Huberman. A M. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Subarsono, A.G 2008. *Analisis Kebijakan Publik:Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudrajat. 2006. *Mengelola Sampah Kota*. Jakarta: Penabar Suwadaya.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subianto, A (2012). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. *In Brilliant*
- Sukmadinata, N. S. (2009). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode penelitian: lengkap, praktis, dan mudah dipahami*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sunggono, Bambang. 2004. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

- Sri Mulyani Indrawati Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang, Universitas Malang
Press
- Suryono dan Budiman (2010), *Sistem 3R*, Institut Teknologi Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Sistem Administrasi publik Republik Indonesia*
(SANKRI). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis
Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press
(Anggota IKAPI).
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*.
Yogyakarta: CAPS

Jurnal

- Alamin, R. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI LIHAT DARI ASPEK SUMBER DAYA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 6(2), 1778-1793.
- Dharma, A. B., Susanti, D., & Marlinda, P. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Bank Sampah di Kota Dumai. *Sebatik*, 27(1), 145-154.
- Okhtafianny, T., & Ariani, R. (2023). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(2), 537-550.
- Komarudin, A., Rosmajudi, A., & Hilman, A. (2023). Implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education and Humanity*, 3(4), 41-49.
- Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).
- Marasabessy, M. D., & Rumodar, I. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Dampak Kehidupan Sosial Masyarakat Kota Ambon (Studi Kasus Pasar Mardika).1(02), 16-24.
- Alamin, R. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI LIHAT DARI ASPEK SUMBER DAYA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG. *JAPB*, 6(2), 1778-1793.
- Puspa, L., & Darmi, T. (2021). Analisis kebijakan pengelolaan sampah pada dinas lingkungan hidup. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 2(2), 45-55.
- Riksfardini, M. (2023). Analisis implementasi kebijakan penanganan sampah laut di wilayah pesisir muara angke jakarta utara. *Pentahelix*, 1(2), 217-236.
- Sahupala, M. I. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya (Studi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya). *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(4), 152.
- Takaluhude, S. A., Gosal, R., & Kasenda, V. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangehe Studi Kelurahan Sawangbendar Kecamatan Tahuna,(2).

Peraturan dan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Dan Recycle* Melalui Bank Sampah.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sorong Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

LAMPIRAN

Lampiran 1

Tabel Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Agustinus Assem, SH.Msi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong
2.	Anie Sakti, IEK, S.si	Kepala Bidang pengelolaan sampah dan limbah B3
3.	Nur Wiryabudi, ST	Seksi pengurangan sampah
4.	Agustinus Bless, ST	Seksi penanganan sampah

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di alun-alun aimas kabupaten sorong?	Faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di alun-alun aimas kabupaten sorong yaitu komunikasi, sumber daya disposisi, dan struktur birokrasi.dengan ini implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik
2.	Apakah ada pelaksanaan kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup kabupaten sorong dengan dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar alun-alun aimas kabupaten sorong?	Dinas lingkungan hidup berupaya menjalin kerja sama antar lembaga pemerintahan Dinas perumahan dan kawasan pemukiman untuk mengatasi permasalahan sampah sehingga dapat berjalan dengan baik.
3.	Bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di Alun-alun aimas kabupaten sorong?	melaksanakan upaya pengurangan, penanganan sampah dan sarana pengelolaan sampah. Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sorong nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah
4.	Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Dinpas Lingkungan Hidup kabupaten	Faktor pendukung komitmen pemerintah kabupaten sorong dan adanya kerja sama antar lembaga pemerintah. Sedangkan

	sorong dalam meningkatkan lingkungan yang bersih alun-alun aimas kabupaten sorong?	faktor penghambat minimnya fasilitas yang tersedia.
5.	Apakah Dinas Lingkungan Hidup kabupaten sorong memiliki peraturan daerah tentang pengelolaan sampah?	Peraturan daerah nomor 4 tahun 2017 merupakan perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten sorong. Menurut peraturan daerah Kabupaten sorong nomor 4 tahun 2017 pemerintah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah serta memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan sampah dan sarana pengelolaan sampah. Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sorong nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah unit pelaksana teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan
6.	Apakah ada pencegahan dan pengurangan sampah yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup terhadap sampah di kabupaten sorong?	Konsep dasar pengelolaan sampah dalam perda tersebut merujuk pada hirarki pengelolaan sampah, mencakup pencegahan dan pengurangan sampah dari sumber yang kemudian dimanfaatkan kembali oleh masyarakat ataupun oleh pihak TPA. Pencegahan dan pengurangan sampah dari sumber dilakukan dengan mereduksi timbunan sampah, penggunaan barang atau bahan yang bisa digunakan kembali, dan pemanfaatan bahan daur ulang. Pemanfaatan kembali sampah dilakukan baik pada jenis sampah organik maupun anorganik. TPA yang ada di kabupaten sorong bertempat di Mariat Gunung KM 32 memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah karena pada akhirnya akan tetap ada sampah yang memang sudah tidak bisa dimanfaatkan secara ekonomis sehingga harus dibuang ke TPA.
7.	Apakah implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten sorong sudah terlaksanakan dengan baik?	tindakan yang telah dilaksanakan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong telah menunjukkan komitmen yang baik. Berbagai upaya dan progam-progam dilaksanakan secara maksimal.

		Komitmen ini lah yang menjadi harapan positif untuk sukses dan tercapainya tujuan-tujuan kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten sorong.
--	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat : Kantor Bupati Jln. Klamono Aimas Km. 24 Sorong Telp. (0951) 321350, Fax (0951) 324350

Nomor : 000.9.6.3
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pendidikan
Muhammadiyah Sorong

Di -

Tempat.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agustinus Assem, SH.M.Si
Nip : 19660824 199610 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Nurul Khotimah
Nim : 146520120039
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Asal : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan pengambilan data penelitian di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong sesuai dengan Nomor Surat : 072/L.3.AU/FHISIPOL/D/2024, selama kurang lebih 1 minggu sejak tanggal, 18 maret 2024 s/d tanggal, 23 maret 2024.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan semestinya, terima kasih.

Aimas, 18 April 2024
KEPALA DINAS

AGUSTINUS ASSEM, SH.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660824 199610 1 002

Foto Bersama Responden Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong



Foto Bersama Responden Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3



Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPN)

Kabupaten Sorong Papua Barat Daya

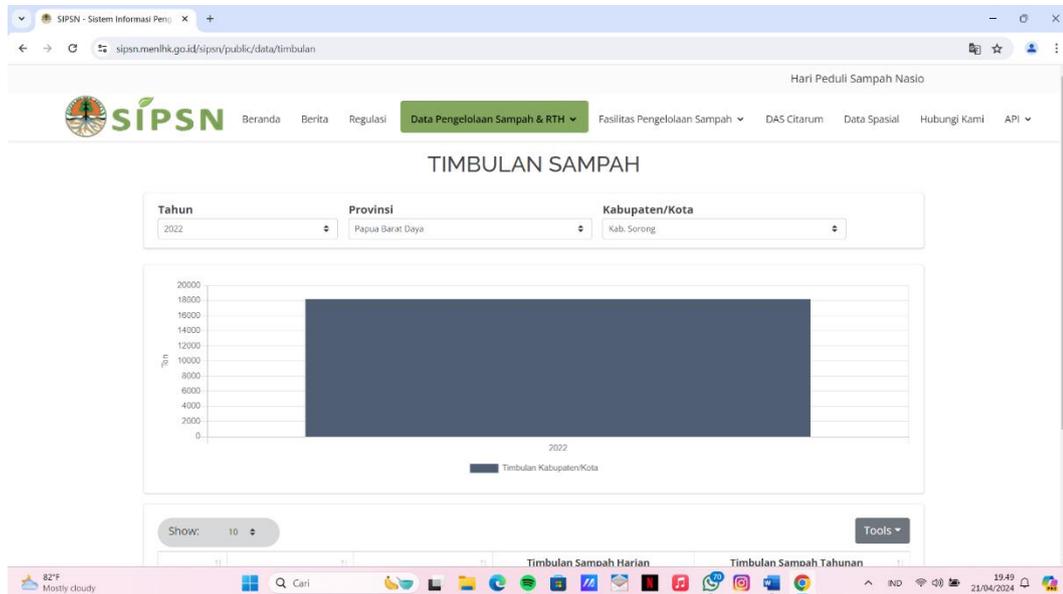


Foto Tumpukan sampah di Alun-alunAimas Kabupaten Sorong

